

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH
KOTA MAKASSAR DI MASA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI



PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

MAKASSAR

2022

KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA

JUDUL PENELITIAN

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH
KOTA MAKASSAR DI MASA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan oleh:

ARWINI MUSDALIFAH

NIM: 105731132918

**Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Makassar**

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

MAKASSAR

2022

02/09/2022

100
Smb. Alumn

P/0461/ AKT/2020
mus
a'

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Dia yang pergi untuk mencari Ilmu Pengetahuan, dianggap sedang berjuang di jalan Allah sampai Dia Kembali (HR. Tirmidzi)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas Ridhonya serta karunianya sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik.

Alhamdulillah Robbil'alamin

Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku tercinta beserta orang-orang yang saya sayang dan almamaterku

PESAN DAN KESAN

Sukses adalah sebuah perjalanan, dan kuliah adalah sebuah tahapan dalam perjalanan itu.



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 gedung iqra Lt.7 Tel. (0411) 866972 Makassar



HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Makassar di Masa Pandemi Covid-19

Nama Mahasiswa : Arwini Musdalifah

No. Stambuk/NIM : 105731132918

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan didepan panitia penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 13 Agustus 2022 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 15 Muharram 1443 H
13 Agustus 2022 M

Menyetujui

Pembimbing I

Mira, SE., M.Ak., Ak
NIDN. 0903038803

Pembimbing II

Muttiarni, SE., MSi
NIDN. 0930087503

Mengetahui

Dekan

Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM. 651 507

Ketua Program Studi Akuntansi

Mira, SE., M.Ak., Ak
NBM. 1286 844



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 gedung iqra Lt.7 Tel. (0411) 866972 Makassar



HALAMAN PENGESAHAN

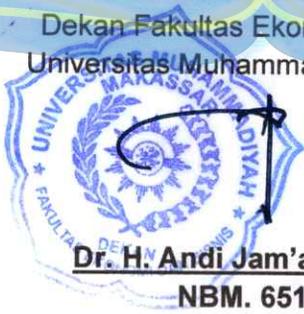
Skripsi atas Nama Arwini Musdalifah, NIM: 105731132918 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 0013/SK-Y/62201/091004/2022, Pada Tanggal, 15 Muharam 1443 H/ 13 Agustus 2022 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **SARJANA AKUNTANSI** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 15 Muharram 1443 H
13 Agustus 2022 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. Ambo Asse, SE., MM
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
(Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, SE., M.ACC
(WD I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Muh. Amir, SE., M.Si., Ak., CA
2. Mira, SE., M.Ak., Ak
3. Amran, SE., M.Ak., Ak., CA
4. Nasrullah, SE., MM

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM. 651 507



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 gedung iqra Lt.7 Tel. (0411) 866972 Makassar



SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Arwini Musdalifah**

Stambuk : 105731132918

Jurusan : **Akuntansi**

Dengan judul : Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Makassar
di Masa Pandemi Covid-19

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

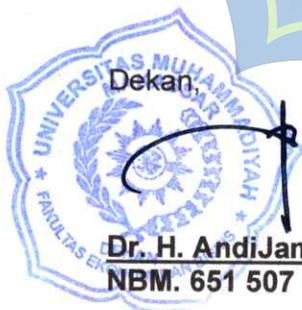
Makassar, 15 Muharram 1443 H
13 Agustus 2022 M

Yang Membuat Pernyataan



Arwini Musdalifah
NIM. 105731132918

Diketahui Oleh:



Dekan,

Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM. 651 507

Ketua Program Studi Akuntansi

Mira, SE., M.Ak., Ak
NBM. 1286 844

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arwini Musdalifah
NIM : 105731132918
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Makassar di Masa Pandemi Covid-19

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Makassar, 15 Muharram 1443 H
13 Agustus 2022 M

Yang Membuat Pernyataan,



Arwini Musdalifah
NIM: 105731132918

KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Makassar Di Masa Pandemi Covid-19”** Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Sainuddin TR.,S.Ip dan Ibu Sitti Jumariah S.pd yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, serta dukungan baik materi maupun moral, dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Mira, SE., M.Ak, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Ibu Mira, SE., M.Ak selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Ibu Muttiarni, SE., MSi selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Kedua orang tua saya Bapak Sainuddin TR.,S.Ip dan Ibu Sitti Jumariah S.Pd, beserta kakak-kakak dan Adek saya yang saya cintai dan segenap keluarga besar saya yang telah memberikan semangat, motivasi dan bantuan moril maupun material sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Kepada Pimpinan dan Staf Badan Pengelola Keuangan Aset dan Daerah (BPKAD) Kota Makassar yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi informasi dalam penyusunan Skripsi ini.

10. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Akuntansi Angkatan 2018. Terkhusus Ak 18H ASP4 yang selalu kebersamai dan memberikan dorongan dalam aktivitas studi penulis.

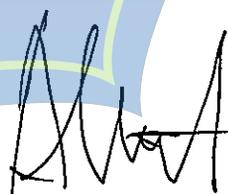
11. Terimah kasih untuk semua kerabat dan teman yang tidak bisa saya tulis satu per satu yang memberikan motivasi dan semangat sehingga penulis mampu merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater tercinta Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Makassar, 13 Agustus 2022



Arwini Musdalifah

ABSTRAK

ARWINI MUSDALIFAH. 2022. Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah kota Makassar Di Masa Pandemi Covid-19. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh: Mira dan Muttiarni

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kinerja keuangan pada Pemerintah Kota Makassar sebelum dan saat Pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan objek yang diteliti adalah data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode tahun 2019–2021. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Kinerja Keuangan Daerah menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dan Rasio Keserasian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pemerintah kota makassar mengalami penurunan kinerja keuangan di masa pandemi covid-19 dibandingkan dengan kinerja tahun sebelum pandemi (2019), dan di tahun 2021 kinerja keuangan pemerintah kota makassar mengalami peningkatan.

Kata Kunci : Covid-19, Kinerja Keuangan, Rasio Keuangan Daerah

ABSTRACT

ARWINI MUSDALIFAH. 2022. *Financial Performance Analysis of the Makassar City Government During the Covid-19 Pandemic*. Thesis. Department of Accounting, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by: Mira and Muttiarni

The purpose of this study was to determine the financial performance of the Makassar City Government before and during the Covid-19 Pandemic. This research is a quantitative descriptive study with the object being studied is the data on the Realization of the Regional Revenue and Expenditure Budget for the period 2019–2021. The data collection technique of this research is documentation. Sources of data used in this study is secondary data. The data analysis used in this research is the Regional Financial Performance Analysis using the Regional Financial Independence Ratio, Effectiveness Ratio, Fiscal Decentralization Ratio, Regional Financial Efficiency Ratio and Harmony Ratio.

The results of this study indicate that the Makassar city government experienced a decrease in financial performance during the covid-19 pandemic compared to the performance in the year before the 2019 pandemic, and in 2021 the Makassar city government's financial performance increased.

Keywords: Covid-19, Financial Performance, Regional Financial Ratios

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN.....	vi
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	5
C. TUJUAN PENELITIAN.....	5
D. MANFAAT PENELITIAN.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Teori.....	7
1. Kinerja dan Pengukuran Kinerja.....	7
2. Kinerja Keuangan.....	8
3. Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	9
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	10
5. Rasio Keuangan Daerah.....	10
B. Tinjauan Empiris.....	17

C. Kerangka Pikir Penelitian	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian	26
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	26
D. Jenis dan Sumber Data	26
E. Populasi dan Sampel.....	27
F. Metode Pengumpulan Data.....	27
G. Definisi Operasional Variabel	27
H. Metode Analisis Data.....	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	30
B. Hasil Penelitian.....	50
C. Pembahasan.....	59
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Kemampuan Daerah.....	12
Tabel 2.2	Penilaian efektivitas.....	13
Tabel 2.3	Kriteria Kemampuan Desentralisasi Fiskal.....	15
Tabel 2.4	Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan.....	16
Tabel 2.5	Penelitian Terdahulu.....	17
Tabel 4.1	Penghitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Makassar	48
Tabel 4.2	Rasio Efektivitas Pemerintah Kota Makassar.....	49
Tabel 4.3	Rasio Desentralisasi Fiskal Pemerintah Kota Makassar.....	50
Tabel 4.4	Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Pemerintah Kota Makassar.....	51
Tabel 4.5	Perhitungan Rasio Kecerahan (Belanja Operasional) Pemerintah Kota Makassar	52
Tabel 4.6	Rasio Kecerahan (Belanja Modal) Pemerintah Kota Makassar.....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian23

Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....32



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Covid-19 (*Coronavirus Disease-19*) ini merupakan virus yang menyerang system pernafasan pada manusia dan virus ini menyebar dengan sangat cepat. Virus ini pertama kali ditemukan di China lebih tepatnya di Kota Wuhan pada akhir Desember 2019, penyebaran virus ini sangat cepat dan menyebar ke hampir seluruh dunia, termasuk Indonesia, Covid-19 melanda Indonesia pada Maret 2020. Damuri dan Hirawan (2020) menyatakan kasus penyebaran Covid-19 ini selanjutnya dapat dilihat dari dua sudut pandang ekonomi yang berbeda, yaitu permintaan dan penawaran. Dari sisi permintaan, kondisi pandemi Covid-19 jelas akan mengurangi sektor konsumsi, kegiatan perjalanan dan transportasi, serta peningkatan biaya transportasi dan perdagangan. Sedangkan dari sisi penawaran, kemungkinan besar yang terjadi adalah terkontraksinya produktivitas pekerja/buruh, penurunan investasi dan kegiatan pendanaan, serta terganggunya rantai pasokan global (*global value chain*).

Dari sisi konsumsi, pola konsumsi masyarakat akibat penyebaran Covid-19 secara otomatis akan berubah. Masyarakat akan cenderung untuk tidak melakukan kegiatan perjalanan atau pariwisata dan lebih cenderung meningkatkan konsumsi pada barang-barang kebutuhan pokok yang dianggap penting sebagai antisipasi terjadinya pembatasan pergerakan manusia. Secara keseluruhan, tingkat konsumsi akan cenderung turun karena harga yang terdistorsi akibat mahalnya biaya transportasi dan logistik barang. Sementara itu, dari sisi produksi, beberapa sektor utama di Indonesia juga akan terdampak akibat penyebaran Covid-19, khususnya industri pengolahan (manufaktur). Kontribusi sektor ini cukup signifikan terhadap ekonomi Indonesia (19-20 persen) dan produk yang berasal dari

industri pengolahan juga menyumbang secara signifikan terhadap total ekspor Indonesia, yaitu di atas 70 persen. Kinerja industri manufaktur di Indonesia kemungkinan akan melambat seiring dengan meningkatnya kasus Covid-19 ini.

McKensey pada salah satu artikelnya, memprediksi pertumbuhan ekonomi global akan melambat sebesar 2,2 persen atau 1,8 persen, jauh meleset dari prediksi awal. (Craven et al., 2020). Bahkan IMF juga memberikan prediksi ekonomi global akan menurun tajam dari perkiraan awal menjadi berada pada angka minus 3 persen. (Kemenkeu.go.id, n.d.-c). Sebagai negara yang memiliki jumlah kasus Covid-19 yang cukup signifikan, Indonesia memproyeksi pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan sebesar 2,3 persen dari prediksi awal sebesar 5,04 persen (Lipi.go.id, 2020). Bahkan dalam skenario terburuk, Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani menyebutkan pertumbuhan ekonomi bisa berada diangka minus 0,4 persen (VOAIndonesia, n.d.). Dampak ini juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat bahkan disemua daerah di Indonesia, begitu juga di Sulawesi Selatan.

Saat itu ada berbagai macam langkah antisipasi yang dilakukan pemerintah untuk meminimalisir penyebaran Covid-19 ini diantaranya adalah ditetapkannya aturan social distancing dan physical distancing di tempat umum, pemberlakuan *work from home* dimana siswa dan pekerja lainnya melakukan aktivitasnya di rumah, ditutupnya pusat perbelanjaan, tempat wisata, dan tempat ibadah, dan pemerintah mendirikan posko-posko penanggulangan Covid-19 pada daerah-daerah perbatasan di Kota maupun di Kabupaten. Langkah-langkah yang dilakukan inilah yang tentu berdampak pada aktifitas perekonomian pada masyarakat. Penyebaran wabah Covid-19 yang mempengaruhi dan mengancam pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan pemerintah dan ketidakpastian ekonomi global, termasuk langkah-langkah khusus dan sektor keuangan.

Berdasarkan Penelitian (Onibala, Rotinsulu, Pingkan, et al., 2021) Terganggunya aktifitas ekonomi akan berimplikasi kepada perubahan dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020, baik sisi Pendapatan Negara, Sisi Belanja Negara maupun sisi pembiayaan. Potensi Perubahan APBN Tahun Anggaran 2020 berasal dari terganggunya aktifitas ekonomi akan banyak berpotensi mengganggu APBN Tahun Anggaran 2020 dari sisi Pendapatan Negara. Respon kebijakan keuangan negara dan fiscal dibutuhkan untuk menghadapi resiko *pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* antara lain berupa peningkatan belanja untuk mitigasi resiko kesehatan, melindungi masyarakat, dan menjaga aktifitas usaha.

Tekanan pada sektor keuangan mempengaruhi APBN tahun Anggaran 2020, terutama dari sisi pembiayaan. Implikasi pandemic Covid 19 telah berdampak pula terhadap ancaman semakin memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktifitas ekonomi domestik karena langkah-langkah penanganan pandemi Covid 19 yang berisiko pada ketidakstabilan makroekonomi dan sistem keuangan yang perlu dimitigasi bersama oleh pemerintah maupun koordinasi kebijakan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), sehingga diperlukan berbagai upaya pemerintah dan lembaga terkait untuk melakukan tindakan antisipasi menjaga stabilitas sektor keuangan.

Penyebaran pandemi Covid 19 yang memberikan dampak dan mengancam pertumbuhan ekonomi Indonesia antara lain karena menurunnya penerimaan negara serta ketidakpastian ekonomi global, memerlukan kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dibidang keuangan negara, termasuk dibidang perpajakan dan keuangan daerah, dan sektor keuangan, yang harus segera diambil oleh pemerintah dan lembaga terkait guna mengatasi kondisi mendesak tersebut dalam rangka penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*) serta pemulihan dunia usaha yang terdampak.

Dampak *pandemic* Covid 19 di Sulawesi Selatan sangat terasa pada triwulan dua dan triwulan tiga, ketika pembatasan sosial berskala besar diterapkan mengganggu mobilitas masyarakat sehari-hari. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Lapangan usaha yang mengalami dampak paling parah adalah penyediaan akomodasi dan makan minum, transportasi dan perdagangan. Sementara status pekerjaan yang mengalami dampak paling parah adalah pekerja bebas atau pekerja lepas, berusaha sendiri (yang pada umumnya berskala mikro), berusaha sendiri dengan dibantu buruh tidak tetap. Namun setelah pelaksanaan *new normal* diterapkan kegiatan perekonomian mulai berangsur membaik.

Menanggapi pandemi Covid-19, masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah harus dilakukan dengan lebih hati-hati. Anggaran Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. APBD digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja Perangkat Daerah.

Dalam pengelolaan laporan keuangan oleh pemerintah Kota Makassar ini bertujuan untuk memberikan informasi yang dapat digunakan dalam rangka pembuatan keputusan ekonomi, social, dan politik serta sebagai bukti atas pertanggung jawaban dalam pengelolaan keuangan kota Makassar. Laporan keuangan juga dapat memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. Penilaian kinerja dilakukan agar mengetahui peningkatan atau perkembangan entitas yang terjadi dari tahun ke tahun, serta juga mengevaluasi kinerja penggunaan sumber daya daerah, terutama pada saat saat masa darurat seperti *pandemic* saat ini. Laporan keuangan juga memberikan

informasi yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen dan organisasi. Penilaian kinerja dilakukan untuk mengetahui pertumbuhan atau perkembangan entitas dari tahun ke tahun, terutama untuk menilai penggunaan sumber daya lokal dalam keadaan darurat pandemi saat ini (Onibala, Rotinsulu, & Rorong, 2021). Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah Kota dalam mengelola keuangan adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan atau direalisasikan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Makassar di Masa Pandemi Covid-19 ”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Makassar Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19.

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui kinerja keuangan pada pemerintah kota Makassar sebelum dan saat pandemi Covid-19.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya konsep atau teori yang berkembang di dalam ilmu pengetahuan pada bidang ekonomi terkhusus dalam hal kinerja keuangan pada saat menghadapi pandemic covid-19 seperti saat ini.

2. Manfaat Praktis

1. Penulis

Penulis berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber pengetahuan bagi pembaca untuk mempelajari lebih lanjut tentang kinerja keuangan dan ilmu terkait lainnya.

2. Akademik

Penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dan juga sebagai tambahan wawasan.

3. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ukuran tentang bagaimana perkembangan kinerja keuangan pada pemerintah kota Makassar disaat pandemi covid-19.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Kinerja dan Pengukuran Kinerja

Kinerja adalah gambaran tentang tingkat pencapaian dalam melaksanakan suatu kegiatan/program/kebijakan demi untuk mewujudkan sasaran,tujuan,misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi (Mahsun,2006 : 25). Istilah kinerja biasanya digunakan untuk menyebut tingkat keberhasilan individu maupun kelompok. Bisa dikatakan kinerja hanya jika individu maupun kelompok individu mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan (Onibala, Rotinsulu, & Rorong, 2021).

Pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya,termasuk informasi atas : efisiensi penggunaan sumber daya alam dalam menghasilkan barang dan jasa; Kualitas barang dan jasa (berapa banyak barang dan jasa yang diberikan kepada pelanggan dan seberapa puas mereka). Hasil kegiatan dibandingkan dengan tujuan; Efektivitas tindakan untuk mencapai tujuan. (Robertson,2002 dalam Mahsun 2006 : 25)

Sementara menurut Lohman (2003) dalam Mahsun,2006 : 25 Pengukuran kinerja adalah suatu kegiatan yang menilai pencapaian tujuan tertentu yang berasal dari tujuan strategis suatu organisasi. Oleh karena itu, pengukuran kinerja mencatat dan mengevaluasi pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat melihat kemajuan organisasi,meningkatkan kualitas dan akuntabilitas keputusan.

2. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan sebagai alat ukur untuk menentukan proses pelaksanaan sumber daya keuangan perusahaan (Covid-, 2020) . Kinerja keuangan adalah kemampuan suatu organisasi untuk mencapai tujuan keuangannya. Menurut Sucipto (2003:6) pengertian "kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi dalam menghasilkan laba". Diukur dengan menghitung aspek kinerja keuangan untuk mengukur seberapa baik suatu perusahaan memenuhi kapasitas keuangannya dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa kinerja keuangan perusahaan merupakan salah satu penentu penyertaan modal oleh calon investor. Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat menunjukkan naik turunnya harga saham perusahaan tersebut, dan kelebihan dan kekurangan perusahaan juga dapat dilihat dari kinerja keuangan perusahaan tersebut.

Kinerja keuangan adalah kegiatan operasi dan investasi suatu perusahaan dengan memperkuat peran perantara keuangan seperti angel investor, investor ventura dan kreditur untuk membantu mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah dan inovasi pasar produk (Rita & Utomo, 2019). Kinerja keuangan juga dapat dinyatakan sebagai hasil dari berbagai kegiatan yang dilakukan dalam sumber daya keuangan yang tersedia. Kinerja keuangan dapat dilihat dari hasil analisis neraca atau analisis rasio keuangan. Dalam menganalisis kinerja keuangan, analisis memerlukan konsep atau aspek yang menjelaskan tingkat keunggulan organisasi. Kinerja keuangan adalah kinerja yang dicapai selama periode waktu tertentu ketika menggambarkan tingkat keunggulan suatu perusahaan (Ratih et al.,2014). Hal ini

dapat menjadi dasar dalam penilaian kondisi kinerja keuangan berdasarkan analisis laporan keuangan.

Menurut Ronald dan Samiyatiningsih (2010): "Kinerja keuangan adalah hasil atau outcome dari suatu kegiatan atau program yang dicapai sesuai anggaran dengan kualitas dan kuantitas yang terukur". Pengukuran kinerja keuangan memiliki banyak tujuan, terutama untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah dan transparansi publik. Selain itu, pengukuran kinerja keuangan pemerintah akan membantu menetapkan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah..

3. Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mahmudi (2016), Salah satu tujuan dan manfaat laporan keuangan adalah menyediakan informasi keuangan serta mengukur dan mengevaluasi kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan. Kinerja keuangan dapat diukur dan dievaluasi dengan menggunakan data dan informasi laporan keuangan yang dipublikasikan. Laporan keuangan yang dipublikasikan adalah laporan keuangan umum yang tidak memenuhi kebutuhan khusus kelompok tertentu. Oleh karena itu, agar laporan keuangan lebih bermakna dan berguna dalam tinjauan pengambilan keputusan serta pengukuran dan evaluasi kinerja, maka perlu dilakukan analisis lebih lanjut.

Banyak analisis laporan keuangan dapat dilakukan berdasarkan informasi laporan keuangan perubahan laporan neraca seperti LRA, LO, LPE, SL, LAK, dan CaLK. Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah, laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports), Laporan Finansial dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan pelaksanaan Anggaran Terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuita (LPE) dan Laporan Arus

Ka. CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

Analisis neraca yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan. Salah satunya adalah penggunaan analisis rasio keuangan untuk menjelaskan hubungan dan rasio keuangan. Analisis KPI berguna untuk mengukur rencana dan menilai posisi keuangan perusahaan (Amelya et al., 2021).

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Mahsun, Firma dan Heribertus (2011:81), Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah merupakan daftar yg memuat rincian penerimaan wilayah ditetapkan menggunakan peraturan wilayah selama satu tahun. Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah ditetapkan menggunakan peraturan wilayah buat masa satu tahun, mulai berdasarkan 1 Januari hingga dengan lepas 31 Desember. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah Anggaran 2015 Pasal 1 ayat 1, pengertian Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah merupakan planning keuangan tahunan pemerintahan wilayah yg dibahas & disetujui beserta sang Pemda & DPRD, & ditetapkan menggunakan peraturan wilayah.

5. Rasio Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah perlu diperhatikan penggunaannya. Menurut Mohamad Mahsun (2011:135) Analisis Laporan Keuangan merupakan alat yang digunakan dalam memahami masalah dan peluang yang terdapat dalam laporan keuangan. Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD

belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya.

Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta (Abdul halim : 2012 : 4)

Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya relative sama dengan yang lainnya. Menurut Abdul Halim (2012 : 4) Adapun pihak-pihak yang memiliki berkepentingan dengan rasio keuangan APBD ini yaitu pihak DPRD, pihak eksekutif, pihak pemerintah pusat ataupun provinsi serta masyarakat dan kreditor.

Ada beberapa cara untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerah salah satunya yaitu dengan menggunakan Rasio Kinerja Keuangan Daerah. Beberapa rasio yang bisa digunakan adalah Rasio efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian Daerah, Rasio keserasian, Rasio derajat desentralisasi fiskal dan Rasio Kemandirian Daerah.

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Halim (2012) menyatakan bahwa Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi Rasio Kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat

ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah.

Demikian pula sebaliknya, semakin rendah Rasio Kemandirian, semakin rendah tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat. Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan pada table sebagai berikut :

Tabel 2.1 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber : Oppier (2013)

2. Rasio Efektivitas

Alat rasio keuangan yang digunakan adalah analisis rasio yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (Halim, 2014:267) yaitu : Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Tabel 2.2
Penilaian Efektivitas

Kriteria Efektivitas	Presentase Efektivas
Sangat efektivitas	Diatas 100%
Efektif	90%-100%
Cukup efektif	80%-90%
Kurang efektif	60%-80%
Tidak efektif	Kurang dari 60%

Sumber : Mohammad Mahsun(2016 : 130)

Menurut Rahardjo (2011:170) dalam jurnal Mega Oktavia Ropa (2016:741) mengatakan efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan, suatu hasil dikatakan efektif jika hasil tersebut benar-benar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, termasuk ketentuan yang berlaku. Efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh yang besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rigel Nurul Fathah (2017:36) dalam jurnalnya yang berjudul Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau yang dianggarkan sebelumnya.

Menurut Nurhayati (2015:58), Rasio efektivitas pendapatan asli daerah dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dengan target penerimaan pendapatan asli daerah (dianggarkan). Menurut Mahmudi (2010:143) dalam jurnal (Ni Ketut Erna Rahmawati dan I Wayan Putra, 2016:1779), Rasio efektivitas pendapatan asli daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan asli daerah sesuai dengan yang ditargetkan. Rasio efektivitas adalah tingkat perolehan hasil suatu kegiatan yang disesuaikan dengan target yang ditentukan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rasio efektivitas adalah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Alokasi Dana Daerah (ADD) yang direncanakan dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan.

3. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Tingkat desentralisasi fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Derajat desentralisasi juga menggambarkan seberapa besar kemampuan keuangan daerah dalam membiayai kegiatannya dengan cara membandingkan antara jumlah pendapatan asli daerah dibagi dengan total penerimaan daerah.

Mahmudi (2010:142) mengatakan bahwa rasio desentralisasi menunjukkan derajat kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total penerimaan, dimana semakin tinggi kontribusi PAD maka kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi semakin baik.

Tabel 2.3 Kriteria Kemampuan Desentralisasi Fiskal

Presentase Desentralisasi %	Kemampuan keuangan
0 – 10	Sangat Kurang
10 – 20	Kurang
20 – 30	Cukup
30 – 40	Sedang
40 – 50	Baik
>50	Sangat Baik

4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan antara jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan asli daerah dibagi dengan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak.

Tabel 2.4 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Kriteria Efisiensi	Presentse Efisiensi
100% Keatas	Tidak Efisien
100%	Efisien Berimbang
Kurang dari 100%	Efisien

Sumber : Mahsun (2012)

5. Rasio Keserasian

Analisis Keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat disitribusi, alokasi dan stabilitasi dengan demikian pemerintah daerah perlu untuk membuat harmonisasi belanja, guna menjaga fungsi anggaran tetap berjalan dengan baik (Mahmudi, 2010 : 162),

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja modal secara optimal. Semakin tinggi presentase dan yang di alokasikan untuk belanja operasi berarti presentase belanja investasi (belanja modal) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Oleh karena itu, rasio belanja modal yang terlatif masih kecil perlu untuk ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah (Halim, 2012 : L-8). Menurut Mahmudi (2010 : 164), rasio keserasian antara lain berupa :

a. Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja

Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang di alokasikan untuk belanja operasi. Pada

umumnya proporsi belanja operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90%. Pemerintah dengan tingkat pendapatan tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih besar dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah.

b. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja

Rasio ini memberikan informasi mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Pengeluaran belanja modal yang dilakukan saat ini akan memberikan manfaat jangka menengah dan Panjang. Pada umumnya proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah adalah antara 5-20 %.

B. Tinjauan Empiris

Tinjauan empiris adalah penelitian yang berasal dari hasil pengamatan atau eksperimen sebelumnya yang membenarkan kepercayaan terhadap fenomena dalam penelitian tersebut. Adapun yang dijadikan sebagai tinjauan empiris guna sebagai perbandingan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	(Onibala, Rotinsulu, Pingkan, et al., 2021)	Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara	Dampak Pandemi Covid-19 dan Keuangan Daerah	Alat uji Non Parametric menggunakan Wilcoxon Test.	Dampak pandemi Covid-19 menyebabkan adanya penurunan kinerja keuangan Kabupaten Minahasa Tenggara di masa pandemi Covid-19 dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya namun pengaruh/dampaknya tidak signifikan
2	(Albanjari et al., 2021)	Analisa Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia Pada Era Pandemi Corona Virus Disease-19	Kebijakan Pemerintah, kinerja keuangan Bank Umum Syariah	Financing Deposit Ratio (FDR), Non-Performing Financing (NPF)	Hasil penelitian menunjukkan financing deposit ratio pada bank umum syariah pada quartal 1 dan quartal 2 mengalami kenaikan rata-rata, artinya kesehatan keuangan menurun seiring dengan kebijakan pemerintah dari penerapan PSBB menuju New Normal. Sedang

					kan pada kuartal 3 sudah megalami penurunan mendekati 75% sehingga bisa diarikan kesehatan keuangan lebih stabil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa non performing financing pada Bank Umum Syariah pada era pandemic Covid-19 cenderung sehat.
3	(Hidayat, 2021)	Analisis Perbandin gan Kinerja Keuangan Dan Nilai Perusahaa n Sebelum Dan Disaat Pandemi Covid-19	Kinerja Keuangan dan Nilai Perusahaan	Uji Paired Sample T- test dan Wilcoxon signed rank test.	Hasil analisis menunjukkan terdapat perbedaan Kinerja Keuangan dan Nilai Perusahaan sebelum dan pada saat pandemi Covid- 19 .Berdasarkan uji beda rata masing-masing Industri mengalami penurunan Laba Persaham dan Nilai Perusahaan.
4	(Esomar & Christianty, 2021)	Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kinerja Keuangan	Pandemi Covid- 19, Kinerja Keuangan	Rasio likuditas,Rasio Solvabilitas,Rasio Profitabilitas dan Rasio pasar.	Hasil empiris menunjukkan bahwa,pada rasio likuiditas dan rasio pasar tidak terdapat

		Perusahaan Sektor Jasa di BEI			perbedaan yang signifikan di antara periode sebelum dan periode sesudah kasus Covid-19 pertama kali diumumkan di Indonesia. Sedangkan, pada rasio solvabilitas dan rasio profitabilitas, terdapat perbedaan yang signifikan di antara kedua periode tersebut.
5	Yoga Adi Surya dan Binti Nur Aisyah (2020)	Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank BNI Syariah dan Mandiri Di Masa Pandemi Covid-19	Kinerja Keuangan, Bank BNI Syariah dan Mandiri Syariah	Sampel T-test	Terdapat perbedaan antara kinerja keuangan Bank BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah dari aspek ROA, NPF, dan BOPO, dan sedangkan dari segi aspek CAR dan ROE menunjukkan bahwa secara signifikan tidak ada perbedaan antara kinerja keuangan Bank Mandiri Syariah dan Bank BNI Syariah.
6	(Amelya et al., 2021)	Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan PT	Kinerja Keuangan, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.	Rasio Likuiditas, solvabilitas, profitabilitas	Hasil dari penelitian ini menunjukkan perbedaan kinerja keuangan PT

		Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Sebelum dan Setelah Adanya Pandemi Covid-19			Indofood CBP Sukses Makmur Tbk sebelum dan setelah adanya pandemi Covid-19. Indikator yang mengalami kenaikan cukup tajam ditunjukkan oleh Debt to Total Equity Ratio dan Debt to Total Assets Ratio. Walaupun demikian, kinerja perusahaan masih bisa dikatakan baik di tengah masa pandemi. Hal ini dibuktikan dengan kemampuan perusahaan meningkatkan penjualan dan laba yang tercermin pada rasio Net Profit Margin.
7	(Frihatni et al., 2021)	Analisis Kinerja Keuangan Perhotelan Akibat Pandemi Covid-19	Pandemi Covid-19, Kinerja Keuangan	Analisis Komparatif	Temuan hasil penelitian ini adalah adanya penurunan pendapatan hotel akibat pandemi Covid-19 yang berada di kisaran 13%-49%. Hasil penelitian ini berkontribusi terhadap dampak pandemi yang

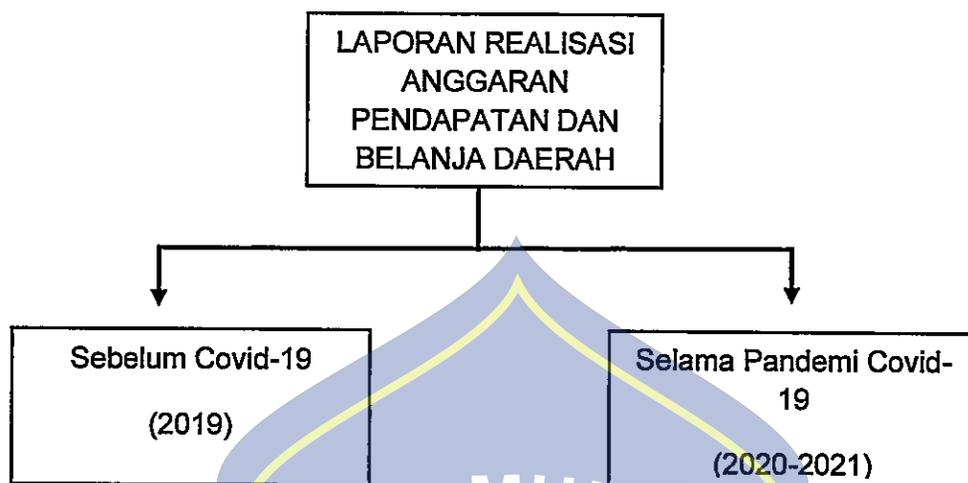
					mempengaruhi sektor perhotelan di daerah. Ini menjadi bukti empiris bahwa kinerja keuangan sektor jasa perhotelan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
8	(Sidarta et al., 2021)	Pengaruh Kinerja Keuangan Perusahaan Terbuka Terhadap Return Saham Pada Masa Pandemi Covid-19 (Pada Perusahaan yang Tercatat di BEI Tahun 2020)	Kinerja Keuangan Perusahaan	STATA MP14	Hasil menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas yang digunakan diantaranya current ratio, debt to equity ratio, dan return on assets berpengaruh terhadap variabel terikat yakni return saham.
9	(Saputri & Hannase, 2021)	Pengaruh Indikator Makroekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19	Indikator Makroekonomi, Kinerja Keuangan	Rasio CAR, NPF, Net, BDR, ROA, NOM, BOPO, FDR dan STM.	Secara umum, disimpulkan bahwa selama masa pandemi Covid-19, indikator makroekonomi memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah, namun berpengaruh tidak signifikan

					<p>terhadap aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif (BDR) dan</p> <p>aspek likuiditas (FDR) bank syariah.</p>
10	(Devi et al., 2020)	The Impact of Covid-19 Pandemic on the Financial Performance of firms on the Indonesia Stock Exchange	The Impact of Of Covid-19, Financial Performance	Wilcoxon Signed Rank Test	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan rasio leverage dan rasio aktivitas jangka pendek, namun terjadi penurunan rasio likuiditas dan rasio profitabilitas perusahaan publik selama pandemi COVID-19. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio likuiditas dan rasio leverage, namun terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio profitabilitas dan rasio aktivitas jangka pendek pada perusahaan publik antara sebelum dan selama pandemi COVID-19. Sektor yang mengalami</p>

					<p>peningkatan rasio likuiditas, rasio profitabilitas, dan rasio aktivitas jangka pendek namun penurunan rasio leverage adalah sektor barang konsumsi, sedangkan sektor yang mengalami penurunan rasio likuiditas dan rasio profitabilitas adalah sektor properti, riil, perkebunan dan konstruksi bangunan, keuangan, perdagangan, jasa, dan investasi.</p>
--	--	--	--	--	--

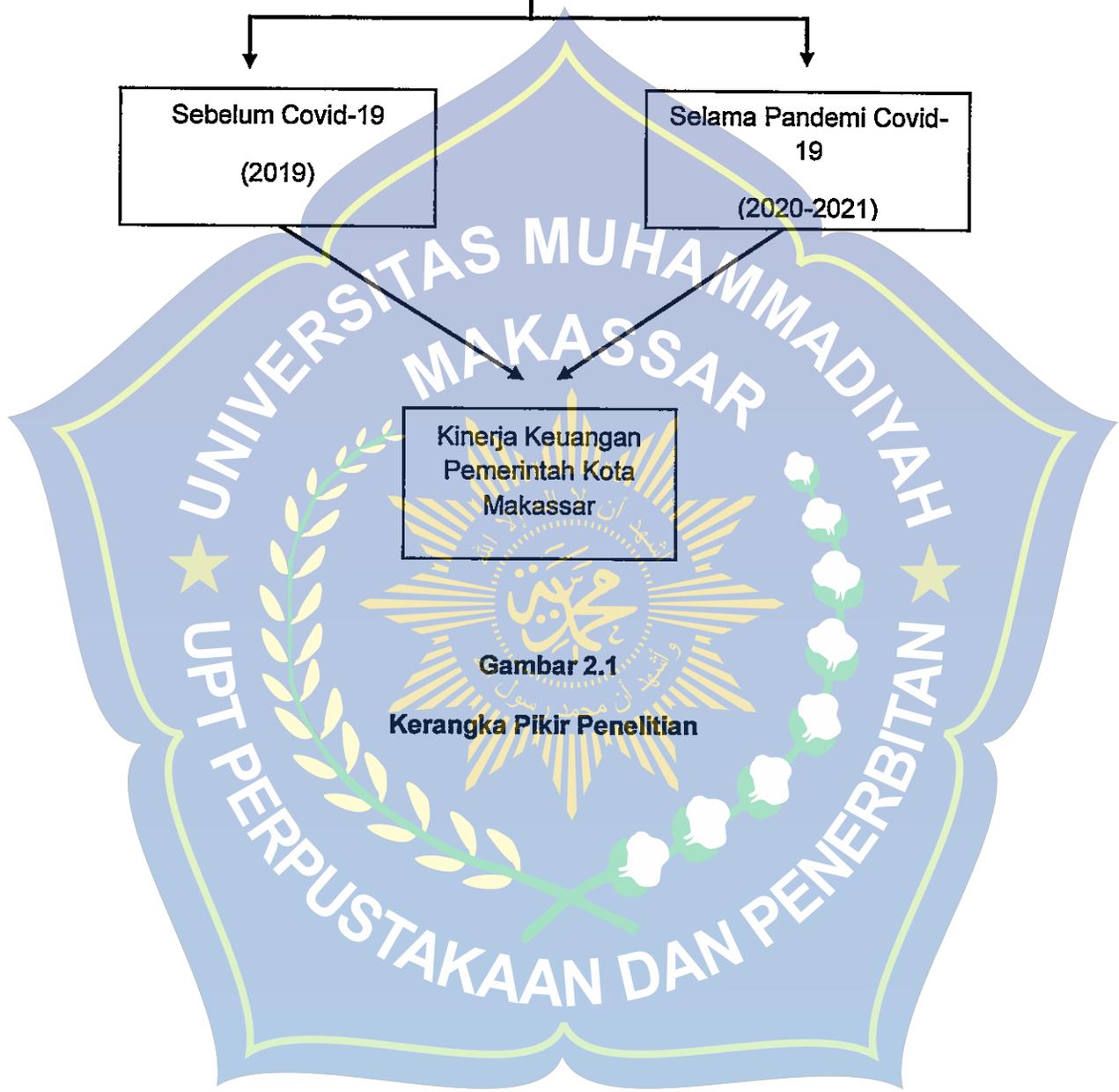
C. Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pikir penelitian ini dibuat untuk memahami pengertian tentang teori yang mendukung hubungan atau pengaruh antar Variabel yaitu mengenai Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota. Dalam kerangka pikir tersebut dapat dijelaskan bahwa untuk mengetahui bagaimana perbedaan kinerja keuangan Pemerintah Kota Makassar sebelum dan selama pandemic Covid-19.



Kinerja Keuangan
Pemerintah Kota
Makassar

Gambar 2.1
Kerangka Pikir Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kuantitatif deskriptif ini digunakan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki (Gunawan, 2013). Metode penelitian kuantitatif bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya.

B. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan pada pemerintah kota Makassar pada saat Pandemi Covid-19. Guna mendalami fokus tersebut penelitian ini akan menggunakan metode kuantitatif. Penelitian Kuantitatif dipilih karena ingin menguji suatu teori dan fokus pada pengaruh terhadap Kinerja tersebut.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Pemerintah Kota Makassar tepatnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kota Makassar sebagai penyedia data.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, yaitu jenis data yang dapat di ukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka-angka. Dimana pada penelitian ini data Kuantitatif diperoleh dari Laporan Realisasi APBD Kota Makassar periode (2019-2021). Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh

secara tidak langsung dan di peroleh dari pihak lain maupun sumber lain yang berkaitan dengan penelitian.

E. Populasi dan Sampel

Populasi yang akan diambil dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar. Sedangkan penarikan sampel diambil dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun 2019-2021.

F. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Menurut Suharso (2009:104). Dokumentasi adalah data sekunder yang disimpan dalam bentuk dokumen atau file (catatan konvensional maupun elektronik), buku, tulisan, laporan, notulen rapat, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya. Data ini diperoleh dari BPKAD Kota Makassar berupa laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Makassar sebelum pandemi covid-19 pada Tahun 2019 dan pada saat pandemic Covid-19 di Tahun 2020-2021.

G. Definisi Operasional Variabel

Untuk mengukur Kinerja Keuangan pemerintah Kota Makassar di masa pandemic covid-19 maka data utama yang digunakan adalah LRA pemerintah Kota Makassar. Adapun variable-variabel yang akan di analisis dalam LRA tersebut adalah sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer).

2. Rasio Efektivitas PAD, yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.
3. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, yang dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Penerimaan Daerah.
4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh realisasi belanja daerah dengan realisasi penerimaan PAD yang diterima.
5. Rasio Keserasian, menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi biaya dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal.

H. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Analisis Kuantitatif ialah analisis dengan melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang di peroleh untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Kota Makassar di masa pandemi covid-19. Rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah kota Makassar adalah sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuam Pemerintah Pusat dan Pinjaman}} \times 100\%$$

2. Rasio Efektivitas

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

3. Rasio Desentralisasi Fiskal

$$\text{Rasio Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

5. Rasio Keserasian

a. Rasio belanja operasi terhadap total belanja

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

b. Rasio belanja modal terhadap Total Belanja

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Pada gambaran lokasi penelitian akan menyajikan dua gambaran umum, yaitu gambaran umum Kota Makassar dan gambaran umum mengenai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Gambaran umum Kota Makassar mencakup kondisi geografis, kependudukan, serta visi dan misi Kota Makassar. Sedangkan gambaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah meliputi struktur organisasi, uraian tugas, fungsi dan tata kerja serta visi dan misi BPKAD.

1. Kondisi Geografis

Makassar adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak di bagian Selatan Pulau Sulawesi yang dahulu disebut Ujung Pandang, terletak antara $119^{\circ}24'17''38''$ Bujur Timur dan $5^{\circ}8'6''19''$ Lintang Selatan yang berbatasan sebelah Utara dengan Kabupaten Maros, sebelah Timur Kabupaten Maros, sebelah selatan Kabupaten Gowa dan sebelah Barat adalah Selat Makassar. Kota Makassar memiliki topografi dengan kemiringan lahan $0-2^{\circ}$ (datar) dan kemiringan lahan $3-15^{\circ}$ (bergelombang). Luas Wilayah Kota Makassar tercatat $175,77$ km persegi. Kota Makassar memiliki kondisi iklim sedang hingga tropis memiliki suhu udara rata-rata berkisar antara 26°C sampai dengan 29°C .

Kota Makassar adalah kota yang terletak dekat dengan pantai yang membentang sepanjang koridor barat dan utara dan juga dikenal sebagai "Waterfront City" yang didalamnya mengalir beberapa sungai (Sungai Tallo, Sungai Jeneberang, dan Sungai Pampang) yang kesemuanya bermuara ke dalam kota. Kota Makassar merupakan hamparan daratan rendah yang berada pada

ketinggian antara 0-25 meter dari permukaan laut. Dari kondisi ini menyebabkan Kota Makassar sering mengalami genangan air pada musim hujan, terutama pada saat turun hujan bersamaan dengan naiknya air pasang.

Secara administrasi Kota Makassar dibagi menjadi 15 kecamatan dengan 153 kelurahan. Di antara 15 kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu Kecamatan Tamalate, Kecamatan Mariso, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Tallo, Kecamatan Tamalanrea, dan Kecamatan Biringkanaya.

Batas-batas administrasi Kota Makassar adalah:

- Batas Utara: Kabupaten Maros
- Batas Timur: Kabupaten Maros
- Batas Selatan: Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar
- Batas Barat: Selat Makassar

Secara umum topografi Kota Makassar dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu :

- a. Bagian Barat ke arah Utara relatif rendah dekat dengan pesisir pantai.
- b. Bagian Timur dengan keadaan topografi berbukit seperti di Kelurahan Antang Kecamatan Panakukang.

Perkembangan fisik Kota Makassar cenderung mengarah ke bagian Timur Kota. Hal ini terlihat dengan giatnya pembangunan perumahan di Kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea, Mangggala, Panakkukang, dan Rappocini.

2. Kondisi Demografi

Secara administrasi kota ini terdiri dari 14 kecamatan dan 143 kelurahan. Kota ini berada pada ketinggian antara 0-25 m dari permukaan laut. Penduduk Kota Makassar pada tahun 2000 adalah 1.130.384 jiwa yang terdiri dari laki-laki 557.050 jiwa dan perempuan 573.334 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata 1,65 %.

Luas wilayah kecamatan :1 Tamalanrea : 31,84 km²; 2 Biringkanaya 48,22 km²; 3 Manggala 24,14 km²; 4 Panakkukang 17,05 km²; 5 Tallo 5,83 km²; 6 Ujung Tanah 5,94 km²; 7 Bontoala 2,10 km²; 8 Wajo 1,99 km²; 9 Ujung Pandang 2,63 km²; 10 Makassar 2,52 km²; 11 Rappocini 9,23 km²; 12 Tamalate 20,21 km²; 13 Mamajang 2,25 km²; 14 Mariso 1,82 km²

- Kepadatan Penduduk : 6.646,5/km²
- Jumlah penduduk : 1,168,258 jiwa.

Penduduk Kota Makassar tahun 2010 tercatat sebanyak 1.339.374 jiwa yang terdiri dari 661.379 laki-laki dan 677.995 perempuan. Sementara itu komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat ditunjukkan dengan rasio jenis kelamin penduduk kota Makassar, yaitu sekitar 92,17 % yang berarti setiap 100 penduduk wanita terdapat 92 penduduk laki-laki. Penduduk Makassar kebanyakan dari Suku Makassar, sisanya berasal dari suku Bugis, Toraja, Mandar, Buton, Tionghoa, Jawa dan sebagainya.

3. Visi dan Misi Kota Makassar

a. Visi

“Percepatan mewujudkan makassar Kota Dunia yang “SOMBERE’ & SMART CITY” dengan IMUNITAS KUAT untuk semu.”

b. Misi

- 1) Revolusi SDM dan percepatan reformasi biokrasi menu SDM Kota yang unggul dengan pelayanan public kelas dunia bersih dari indikasi korupsi.
- 2) Rekontruksi Kesehatan ekonomi, social dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan Kesehatan kota yang kuat untuk semua.
- 3) Restorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia yang "sombere' & smart" city untuk kita semua.

4. Struktur Organisasi

Dalam struktur organisasi pemerintah daerah merupakan wadah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah dan sebagai proses interaksi antara pemerintah dengan institusi daerah lainnya dengan masyarakat sebagai pilar pembangunan daerah. Struktur Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Makassar berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 109 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



Gambar 4.1

5. Uraian Tugas dan Fungsi

a. Kepala Badan

1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah.

2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan

b. pelaksanaan dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan;

c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan;

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai uraian tugas:

a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah;

- b. merumuskan dan melaksanakan visi dan misi badan;
- c. merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat dan Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Bidang Aset;
- d. merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA dan Perjanjian Kinerja (PK) badan;
- e. mengoordinasikan dan merumuskan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
- f. merumuskan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) badan;
- g. merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) badan;
- h. mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana;
- i. merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset;
- j. merumuskan dan melaksanakan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

k. menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

l. melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengelolaan dan pengendalian serta evaluasi administrasi keuangan Daerah;

m. merumuskan dan melaksanakan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah Daerah serta pengelolaan utang dan piutang Daerah;

n. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah;

o. melaksanakan inventarisasi barang Daerah dan mutasi aset;

p. melaksanakan pengelolaan aset/barang milik Daerah;

q. melaksanakan bimbingan dan petunjuk teknis pengelolaan aset/barang milik Daerah;

r. merumuskan kebijakan teknis pedoman pengelolaan dan penghapusan aset/barang milik Daerah;

s. melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang/aset milik Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh walikota;

t. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik

Daerah yang berada dalam penguasaannya;

u. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

v. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

w. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada pimpinan;

x. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;

y. membina, membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

z. melaksanakan pembinaan jabatan fungsional;

aa. melaksanakan pembinaan unit pelaksana teknis;

bb. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada walikota melalui sekretaris Daerah;

cc. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh walikota.

b. Sekretariat

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pelayanan administrasi kepada semua unit organisasi di lingkungan badan.

(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan operasional urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;

- b. pelaksanaan urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- c. pengoordinasian urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

3) Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretariat mempunyai uraian tugas:

- a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Sekretariat;
- b. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan Pelaporan, Subbagian Keuangan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- d. menghimpun dan menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Sekretariat;
- e. mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Sekretariat;
- f. mengoordinasikan setiap bidang dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA), Indikator

Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA dan Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan;

- g. mengoordinasikan setiap bidang dalam penyiapan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kota dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya
- h. mengoordinasikan setiap bidang dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) badan
- i. mengoordinasikan setiap bidang dalam pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana;
- j. mengoordinasikan penyelenggaraan urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan aset serta urusan kehumasan, dokumentasi dan protokoler badan;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- l. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

- m. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- n. melaksanakan pembinaan disiplin aparatur sipil negara di lingkup badan;
- o. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- p. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

c. Bidang Anggaran

(1) Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran, administrasi anggaran dan pembiayaan dan investasi yang menjadi kewenangan pemerintah Kota.

(2) Bidang Anggaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan operasional di bidang anggaran;
- b. pelaksanaan kegiatan di bidang anggaran;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang anggaran;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang anggaran;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

(3) Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Anggaran mempunyai uraian tugas:

- a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Bidang Anggaran;
- b. menghimpun dan menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bidang Anggaran;
- c. mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bidang Anggaran;
- d. mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan pembahasan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- f. menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) beserta
- g. ;mengkoordinasikan penyusunan standar harga dan analisis standar belanja Daerah;
- h. melaksanakan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD;
- i. menyusun perencanaan anggaran Kas dan menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- j. menyusun peraturan perundangan Daerah dan kebijakan pengelolaan anggaran;
- k. menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan anggaran pendapatan belanja Daerah dan pelaksanaan pembiayaan dan investasi Daerah.

- l. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan pembiayaan dan investasi;
- m. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- n. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- o. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- p. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- q. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

d. Bidang Perbendaharaan

(1) Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perbendaharaan umum Daerah, perbendaharaan belanja dan verifikasi bukti penerimaan dan pengeluaran keuangan Daerah.

(2) Bidang Perbendaharaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan operasional di bidang perbendaharaan;
- b. pelaksanaan kegiatan di bidang perbendaharaan;
- c. pengoordinasian kegiatan di bidang perbendaharaan;

- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perbendaharaan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

(3) Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Perbendaharaan mempunyai uraian tugas:

- a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Bidang Perbendaharaan;
- b. menghimpun dan menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bidang Perbendaharaan;
- c. mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bidang Perbendaharaan;
- d. melaksanakan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- e. melaksanakan pemantauan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
- f. melaksanakan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- g. melaksanakan penyimpanan dan penempatan uang Daerah;
- h. melaksanakan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum Daerah;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan kewajiban perpajakan;

- j. menyusun kebijakan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan umum Daerah, belanja dan verifikasi kelengkapan penerimaan dan pengeluaran keuangan Daerah;
- k. melaksanakan penyusunan peraturan pelaksanaan dan pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- l. melaksanakan verifikasi dan meneliti kelengkapan administrasi penerimaan kas dan pengeluaran kas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- m. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- n. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- o. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan
- p. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- q. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

e. Bidang Akuntansi

(1) Bidang Akuntansi yang mempunyai tugas melaksanakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang piutang dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya dalam rangka menyusun laporan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

(2) Bidang Akuntansi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan operasional di bidang akuntansi;
- b. pelaksanaan kegiatan di bidang akuntansi;
- c. pengoordinasian kegiatan di bidang akuntansi;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang akuntansi;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

(3) Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Akuntansi mempunyai uraian tugas:

- a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Bidang Akuntansi;
- b. menghimpun dan menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bidang Akuntansi;
- c. mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bidang Akuntansi;

- d. menyusun kebijakan dan pedoman teknis operasional penyelenggaraan akuntansi Daerah; melaksanakan akuntansi dan sistem informasi pengelolaan keuangan Daerah;
- e. melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah;
- f. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah Daerah;
- g. melaksanakan pengelolaan hutang dan piutang Daerah;
- h. menyelenggarakan evaluasi laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- j. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- k. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- l. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

f. Bidang Aset

(1) Bidang Aset mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan aset Daerah.

(2) Bidang Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan operasional di bidang aset
- b. pelaksanaan kegiatan di bidang aset;
- c. pengoordinasian kegiatan di bidang aset;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang aset;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

(3) Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2), Bidang Aset mempunyai uraian tugas:

- a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Bidang Aset;
- b. menghimpun dan menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bidang Aset;
- c. mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bidang Aset;

d. merumuskan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi mutasi aset dan inventarisasi serta pemanfaatan dan pemberdayaan aset;

e. melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan kebijakan umum dan teknis rencana kebutuhan aset Daerah, penelitian dan pengkajian kebutuhan barang Daerah sebagai dasar pelaksanaan pengadaan barang, mengikuti pelaksanaan pelelangan barang dan bangunan, pelaksanaan administrasi barang Daerah, penilaian dan penyusutan aset Daerah, pencatatan barang milik Daerah, inventarisasi data aset Daerah, penyimpanan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan Daerah serta pelaksanaan sensus barang milik Daerah setiap 5 (lima) tahun sekali;

f. melaksanakan penyusunan pedoman petunjuk teknis pemanfaatan dan pengendalian kekayaan Daerah, evaluasi daftar hasil pengadaan barang Daerah, pemantauan dan pengawasan kepemilikan aset Daerah serta dokumentasi kepemilikan aset berupa kendaraan, tanah dan bangunan;

g. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

h. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

- i. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- j. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

B. Hasil Penelitian

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel 4.1
Penghitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Pemerintah Kota Makassar

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Bantuan PP dan Pinjaman	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
2019	1.624.776.235.586.00	543.757.717.701.000	30%
2020	1.144.166.180.881.00	638.003.957.091.000	18%
2021	1.326.375.011.303.82	947.433.038.048.000	14%
RATA-RATA			21%

Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Penghitungan rasio kemandirian keuangan daerah didasarkan pada perbandingan antara jumlah PAD dengan total dana transfer yang mencakup bantuan pemerintah pusat, pemerintah provinsi serta jaminan.

Hasil menemukan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Kota Makassar sebelum pandemi pada tahun 2019 yaitu 30% atau dalam kategori rendah. Hal ini menunjukkan pola hubungan yang terbentuk adalah konsultatif yang berarti bahwa pemerintah daerah dinilai sedikit lebih mampu menjalankan otonomi daerah, dan campur tangan pemerintah pusat mulai berkurang. Otonomi daerah yang dimaksud yaitu menentukan dan menetapkan UMR, dan mengelola sendiri Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kota Makassar.

Hasil Rasio Kemandirian Keuangan Daerah kota Makassar di tahun 2020 (di masa pandemi covid-19 periode pertama) mengalami penurunan yaitu 18% dan di tahun 2021 (masa pandemi covid-19 di periode kedua) menurun menjadi 14% yang dikategorikan rendah sekali, dan dalam pola hubungan Instruktif. Hal ini dikarenakan peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah dan daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah, seperti menentukan UMR, mengelola sendiri APBD, memberlakukan retribusi daerah, dan memberlakukan pajak daerah.

Menurut hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah sebelum pandemi dan pada saat pandemi covid-19 pemerintah Kota Makassar memiliki rata-rata kemandiriannya masih tergolong rendah sekali dan dalam kategori pola hubungan Instruktif, yaitu peranan pemerintah pusat masih sangat dominan dibandingkan pemerintah daerah, karena masih tergolong interval 0-25%. Rasio kemandirian yang masih rendah menggambarkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintah dan pembangunan daerah masih sangat tergantung bantuan dari pemerintah pusat.

2. Rasio Efektivitas

Tabel 4.2
Rasio Efektifitas
Pemerintah Kota Makassar

Tahun	Realisasi PAD	Anggaran PAD	Rasio efektifitas PAD
2019	1.303.316.337.553.94	1.624.776.235.586.00	80%
2020	1.078.328.561.269.15	1.144.166.180.881.00	94%
2021	1.140.328.483.697,93	1.326.375.011.303.82	86%
RATA-RATA			87%

Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Hasil perhitungan pada Rasio Efektivitas PAD Pemerintah Kota Makassar di tahun 2019 yaitu 80% dan dikategorikan cukup efektif karena rata-rata efektivitasnya berada pada presentase 80% - 90%. Hal ini disebabkan karena penerimaan dari sektor pajak seperti pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame tidak mencapai target dari yang dianggarkan sebelumnya.

Hasil Rasio Efektivitas pada tahun 2020 yaitu 94% dan dikategorikan efektif yang berarti penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah seperti retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu mencapai anggaran yang telah di tetapkan. Sedangkan hasil Rasio Efektivitas di tahun 2021 yaitu 86% dan berada pada kategori cukup efektif yang berarti Pemerintah Kota Makassar dapat dikatakan memiliki kinerja yang cukup baik dalam hal merealisasikan PAD yang telah di rencanakan.

Menurut hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa Rasio Efektivitas Pemerintah Kota Makassar memiliki rata-rata yaitu 87% yang berarti pemerintah

kota makassar cukup efektif atau cukup baik dan hampir mencapai penerimaan dari yang dianggarkan. Pemerintah kota Makassar harus mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada dan mengoptimalkan penerimaan potensi pendapatan yang ada dan diharapkan dapat memaksimalkan potensi-potensi PAD di daerah tersebut sehingga bisa melampaui target yang telah ditentukan. Alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk meningkatkan potensi daerah antara lain mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program program Kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD, misalnya pendirian BUMD sektor potensial contohnya bidang transportasi, bidang keuangan dengan mendirikan bank daerah, dan PDAM sbagai penyedia air bersih.

3. Rasio Desentralisasi Fiskal

**Tabel 4.3 Rasio Desentralisasi Fiskal
Pemerintah Kota Makassar**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan Daerah	Rasio Desentralisasi Fiskal
2019	1.624.776.235.586.00	4.055.576.463.716.00	40%
2020	1.144.166.180.881.00	3.469.163.140.080.00	33%
2021	1.326.375.011.303.82	3.577.236.761.303,82	37%
RATA-RATA			37%

Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil pengukuran Kinerja Desentralisasi Fiskal Pemerintah Kota Makassar di tahun 2019 yaitu 40% berada pada kriteria baik, hal ini dikarenakan pemerintah Kota makassar melaksanakan

dengan baik kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan pemerintah daerah seperti memangkas angka kemiskinan, penataan transportasi publik, dan mengembangkan potensi pariwisata.

Hasil rasio Derajat desentralisasi fiskal pemerintah kota makassar di tahun 2020 yaitu 33% dan tahun 2021 yaitu 37% dan dalam kategori sedang. Dapat diartikan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Makassar dalam membiayai pembangunan dan operasional di pemerintahan sedikit mampu membiayai pemerintah sendiri, pembangunan yang dimaksud ialah pelayanan Kesehatan dan Pendidikan, penguatan badan usaha milik daerah, dan menciptakan iklim usaha yang baik bagi para pelaku usaha dan bisnis.

Tabel 4.3 diatas menunjukkan rasio derajat desentralisasi fiskal Pemerintah Kota Makassar dari tahun 2019-2020 mengalami penurunan dan kembali meningkat di tahun 2021 . Rasio tersebut dalam tiga tahun terakhir sebelum dan pada saat pandemi covid-19 berada pada rata rata 37% dan dikategorikan sedang. Dapat diartikan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Makassar dalam membiayai pembangunan atau operasional sedikit mampu membiayai pemerintah sendiri.

4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

**Tabel 4.4 Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah
Pemerintah Kota Makassar**

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi Penerimaan Daerah	Rasio Efisiensi Keuangan Daerah
2019	3.548.006.636.749.30	3.666.359.990.154.91	97%
2020	2.968.616.107.772.68	3.323.662.286.602.00	89%
2021	3.150.496.728.994,07	3.286.048.497.393,93	96%
RATA-RATA			94%

Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Hasil perhitungan Rasio efisiensi PAD Kota Makassar di tahun 2019 yaitu 97% dan berada pada kategori Efisien, hal tersebut menggambarkan kinerja pemerintah daerah Kota Makassar efisien dalam menekan biaya yang dikeluarkan untuk mengoptimalkan perolehan PAD, biaya yang dimaksud yaitu belanja rutin untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan yang meliputi belanja pegawai (belanja gaji, tunjangan, uang makan, uang lembur PNS) dan belanja barang (keperluan perkantoran, sewa gedung, pembayaran listrik).

Hasil perhitungan Rasio efisiensi PAD di tahun 2020-2021 juga berada di kategori yang sama dengan tahun sebelumnya yaitu Efisien karena nilai presentase yang dihasilkan kurang dari 100%, dan menggambarkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kota Makassar efisien dalam mengelola pengeluaran daerah yaitu belanja daerah seperti belanja pegawai berupa pembayaran gaji bagi pegawai otonom, belanja barang dan jasa, pembelian inventaris kantor, biaya Pendidikan, dan biaya perjalanan dinas bagi kegiatan pegawai.

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Efisiensi Keuangan Daerah diketahui bahwa rata-rata Efisiensi Keuangan Daerah Pemerintah Kota Makassar dari tahun 2019 sampai dengan 2021 sebesar 94%. Biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Makassar untuk memperoleh pendapatannya kecil dapat dikatakan kinerja Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini masih baik karena dapat menekan jumlah daerahnya. Untuk ke depannya diharapkan pemerintah Kota Makassar tetap meminimalisir jumlah belanjanya dengan cara disesuaikan dengan pendapatannya sehingga ke depannya tetap berada pada tingkatan efisiensi.

5. Rasio Keserasian

a. Belanja Operasi

Tabel 4.5 Perhitungan Rasio Keserasian (Belanja Operasional)

Pemerintah Kota Makassar

Tahun	Total Belanja Operasional	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja Operasi
2019	3.024.805.711.330,00	3.548.006.636.749,30	85%
2020	2.969.436.720.232,00	2.968.616.107.772,68	100%
2021	3.246.359.826.405,49	3.150.496.728.994,07	103%
RATA-RATA			96%

Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Hasil Rasio Belanja Operasional di tahun 2019 yaitu 85%, dapat dikatakan rasio keserasian belanja operasi Pemerintah Kota Makassar dalam keadaan baik karena berada pada kisaran 60-90%, yang berarti pemerintah kota makassar cukup baik dalam mengeluarkan anggaran untuk kegiatan sehari-hari

pemerintah seperti biaya rapat/pertemuan, ATK, Uang saku, uang transportasi lokal, dan biaya sewa peralatan yang mendukung penyelenggaraan kegiatan.

Hasil Rasio Operasional Pemerintah Kota Makassar di tahun 2020-2021 sangatlah besar karena melebihi proporsi umum yaitu melebihi 90%, hal ini yang berarti pemerintah kota makassar mengalokasikan anggaran lebih banyak untuk kegiatan pemerintah.

Hasil Rasio Operasi Pemerintah Kota Makassar sangatlah besar dan melebihi proporsi umum pemerintah daerah, rata-rata Rasio Belanja Operasi sebelum dan pada saat pandemi Covid-19 yaitu 96%. Hal ini disebabkan oleh besarnya alokasi dana untuk belanja operasi terutama dikarenakan oleh belanja pegawai yang relatif besar, Pemerintah Kota Makassar lebih banyak mengeluarkan pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas Pemerintah.

b. Belanja Modal

Tabel 4.6 Rasio Keserasian (Belanja Modal)

Pemerintah Kota Makassar

Tahun	Total Belanja Modal	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja Modal
2019	1.119.500.011.164.00	3.548.006.636.749.30	32%
2020	601.990.423.167.91	2.968.616.107.772.68	20%
2021	668.274.936.260,00	3.150.496.728.994,07	21%
RATA-RATA			24%

Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Hasil analisis rasio belanja modal pada tahun 2019 yaitu 32%, hal ini dikarenakan dana yang di alokasikan untuk belanja modal pada Pemerintah Kota Makassar besar, seperti tanah, gedung, dan bangunan. Sedangkan Hasil rasio beanja modal di tahun 2020 yaitu 20% dan berada pada kisaran umum proporsi belanja modal yaitu 5-20%, yang berarti pengeluaran belanja modal pada saat itu lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Hasil rasio belanja modal di tahun 2021 meningkat 1% dari tahun sebelumnya yaitu 21% berarti pengeluaran dana untuk belanja modal sedikit lebih tinggi dari total belanja modal di tahun sebelumnya.

Tabel di atas menunjukkan hasil rasio belanja modal di Pemerintah Kota Makassar sebelum dan pada saat pandemi covid-19, rata-rata belanja modal yaitu 24%. Jumlah ini diatas rata-rata belanja modal di pemerintah daerah yaitu sebesar 20% (Mahmudi, 2016).

Menurut uraian dan perhitungan di atas bahwa sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Kota Makassar masih di prioritaskan kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relative kecil. Rasio Belanja Operasi masih sangat besar dibandingkan Rasio Belanja Modal, Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi terutama dikarenakan oleh belanja pegawai yang relatif besar, Pemerintah Kota Makassar lebih banyak mengeluarkan pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas pemerintahan dan belum memperhatikan pembangunan daerah. Pemerintah daerah masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja modal, sehingga Pemerintah Daerah masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja operasi yang mengakibatkan Belanja Modal Pemerintah Kota Makassar kecil atau belum terpenuhi. Untuk itu, kedepannya Pemerintah Kota Makassar diharapkan lebih memperhatikan

pelayanan kepada masyarakat yang nantinya dapat dinikmati langsung oleh Publik. Karena pada dasarnya dana pada anggaran adalah dana publik sehingga dana tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

C. Pembahasan

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Makassar dari tahun 2019, sebelum pandemic covid-19 sampai dengan 2020 terjadi penurunan dan di tahun berikutnya 2021 mengalami peningkatan. Hal ini di pengaruhi karena terdapat pengurangan pendapatan dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan dan Lainnya dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 Pendapatan Asli Daerah yaitu Rp. 1.624.776.235.586.00. Lalu pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi Rp 1.144.166.180.881.00 dan di tahun 2021 mengalami peningkatan yaitu Rp. 1.326.375.011.3030.82.

Berdasarkan pada table 4.1 menggambarkan bahwa pendapatan atau bantuan dari pemerintah pusat maupun provinsi selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 yaitu Rp. 543.757.717.701 dan ditahun selanjutnya mengalami peningkatan di masa pandemi covid-19 menjadi Rp 638.003.957.091 kemudian di tahun 2021 juga mengalami peningkatan yaitu Rp 947.433.038.048.

2. Rasio Efektivitas

Berdasarkan pada Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2019 sebesar Rp. 1.303.316.337.553.94 mengalami penurunan ditahun 2020 menjadi Rp 1.078.328.561.269.15 dan di periode selanjutnya pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi Rp 1.140.328.483.697.93. Dilihat dari Anggaran PAD di tahun 2019 sebesar Rp 1.624.776.235.586 mengalami penurunan di tahun 2020 yaitu Rp

1.144.166.180.881.00 dan kemudian di tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi Rp 1.326.375.011.303.82.

3. Rasio Derajat Desentralisasi Fiska

Hasil dari perhitungan yang didapat menggunakan rasio derjata desentralisasi fiskal dapat dilihat pada Tabel 4.3. Tabe ini menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Makassar pada tahun 2019 Rp 1.624.776.235.586 dan mengalami penurunan di tahun 2020 yaitu 1.144.166.180.881.00 dan mengalami peningkatan di tahun 2021 sebesar Rp 1.326.375.011.303.82. Total Penerimaan Daerah Pemerintah Kota Makassar dari tahun 2019 (Rp 4.055.576.463.716.00) sampai dengan 2020 (Rp 3.469.163.140.080.00) terjadi penurunan karena terdapat penurunan Pendapatan Daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah dari tahun sebelumnya. Meskipun mengalami penurunan di 2019-2020 di periode selanjutnya di tahun 2021 penerimaan daerah mengalami peningkatan sebesar Rp 3.577.236.761.303.82.

4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Berdasarkan perhitungan pada table 4.4 diketahui bahwa Realisasi Belanja Daerah Kota Makassar dari tahun 2019 sampai dengan 2020 mengalami penurunan Rp 2.968.616.107.772.68 dimana terdapat belanja pegawai, barang dan jasa, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, dan seluruh belanja modal mulai dari belanja tanah, peralatan, gedung, jalan dan asset tetap lainnya meningkat dari tahun sebelumnya. Sedangkan, di tahun 2021 Realisasi Belanja Daerah Kota Makassar mengalami peningkatan dari tahun sebelunya yaitu Rp 2.968.616.107.772.68.

Realisasi Penerimaan PAD kota makassar dari tahun 2019 sampai dengan 2020 juga mengalami penurunan, dan realisasi penerimaan PAD meningkat di tahun 2021. Rata-rata efisiensi keuangan daerah dari tahun 2019-2021 yaitu 96% dan berada pada kategori efisien.

5. Rasio Keserasian

a. Realisasi Belanja Operasi

Total realisasi belanja daerah yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja keuangan mengalami penurunan di periode pertama pandemic covid-19 berlangsung. Pada tahun 2019 yaitu Rp 3.024.805.711.330.00, lalu pada tahun 2020 menjadi 2.969.436.720.332.00 dan di periode selanjutnya tahun 2021 meningkat menjadi 3.249.359.826.405.49.

b. Realisasi Belanja Modal

Berdasarkan dari hasil perhitungan pada table 4.6 diketahui bahwa realisasi total belanja daerah Pemerintah Kota Makassar dari tahun 2019 sampai dengan 2020 terjadi penurunan yang sangat drastis. Karena terdapat pengurangan Belanja daerah yang terdiri dari : Belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 realisasi belanja modal yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung, belanja jalan, irigasi dan jaringan, serta belanja asset tetap lainnya mengalami penurunan yaitu sebesar Rp 1.119.500.011.164.00, lalu pada tahun 2020 (saat pandemic periode pertama) mengalami penurunan menjadi Rp 601.990.423.167.91, lalu di periode selanjutnya mengalami peningkatan pada tahun 2021 yaitu Rp 668.274.935.260.00

Berdasarkan hasil analisis penelitian dari (RAHMAWATI & KISWARA, 2022) menyimpulkan bahwa terjadi perbedaan signifikan sebelum dan selama Covid 19 mengenai kinerja keuangan daerah pada rasio efektivitas PAD, rasio kontribusi pajak daerah pada PAD, dan rasio belanja modal. Sedangkan rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, dan rasio kontribusi retribusi daerah pada PAD disimpulkan tidak terjadi perbedaan signifikan mengenai kinerja keuangan daerah pemerintah provinsi sebelum dan selama Covid-19. Sedangkan hasil penelitian dari (Ariadi & Jatmika, 2021) menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa mempunyai tingkat kemandirian yang sedang, indeks kemampuan belanja rutin menunjukkan bahwa proporsi kemampuan PAD untuk membiayai belanja rutin masih dibawah 20% dari total belanja dan total Anggaran pemerintah daerah Provinsi Papua dan proporsi perkembangan untuk belanja rutin ditahun 2020 cukup signifikan dan total belanja pemerintah daerah Provinsi Papua justru mengalami peningkatan dimasa pandemi, demikian dengan proporsi perkembangan PAD.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Analisis data dan pembahasan maka dapat disimpulkan :

1. Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Makassar selama sebelum dan saat pandemi Covid-19 (tahun 2019-2021) jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada kategori Rendah sekali.
2. Kinerja keuangan Pemerintah Kota Makassar jika dilihat dari Rasio Efektifitas PAD berada pada kategori cukup efektif.
3. Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Makassar di lihat dari Rasio Desentralisasi Fiskal berada pada kategori Cukup.
4. Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Makassar jika dilihat dari rasio Efisiensi Keuangan Daerah berada pada kategori efisien.
5. Kinerja keuangan Pemerintah Kota Makassar jika dilihat dari Rasio keserasian dapat menunjukkan bahwa belanja operasi dan belanja modal belum seimbang. Karena Pemerintah Kota Makassar lebih memprioritaskan pengeluaran yang bersifat rutin dari pada pembangunan daerah.
6. Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Makassar mengalami penurunan di tahun 2020 (pandemi periode pertama) dari tahun sebelumnya yaitu 2019 (Sebelum pandemi), lalu mengalami peningkatan kinerja di tahun berikutnya yaitu 2021 dimana saat itu pandemi masih belangsung.

B. Saran

1. Pemerintah Kota Makassar sebaiknya mengurangi ketergantungan terhadap sumber dana eksterne atau bantuan pemerintah pusat dan provinsi dengan cara mengelola pemungutan Pendapatan Asli Daerah secara spesifik, yaitu dengan memperbaiki sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah yang menjadi sumber yang dapat meningkatkan PAD sehingga potensi yang ada bisa dikelola dengan baik oleh Pemerintah Kota Makassar.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sama diharapkan menggunakan lebih banyak rasio lagi sehingga hasil penelitiannya bisa lebih akurat. Selain itu diharapkan untuk lebih rinci lagi dalam menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah



DAFTAR PUSTAKA

- Albanjari, F. R., Prihatin, R., & ... (2021). Analisa Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia Pada Era Pandemi Corona Virus Disease-19. ...: *Journal of Islamic ...*, 1(1), 9–19. <http://journal.umpo.ac.id/index.php/MUSYROKAH/article/view/3851>
- Amelya, B., Nugraha, S. J., & Puspita, V. A. (2021). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pt Indofood Cbp Sukses Makmur Tbk Sebelum Dan Setelah Adanya Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen , Ekonomi , Dan Akuntansi)*, 5(3), 534–551.
- Ariadi, W., & Jatmika, W. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Dimasa Pandemi Coved- 19. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), 11–15. <https://doi.org/10.55049/jeb.v12i1.63>
- Covid-, D. M. P. (2020). *BNI Syariah Dan Bank Syariah Mandiri*. <https://doi.org/10.1905/iqtishadia.v7i2.3672>
- Devi, S., Warasnasiah, N. M. S., & Masdiantini, P. R. (2020). The Impact of COVID-19 Pandemic on the Financial Performance of Firms on the Indonesia Stock Exchange. *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, 23(2). <https://doi.org/10.14414/jebav.v23i2.2313>
- Esomar, M. J. F., & Christianty, R. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Sektor Jasa di BEI. *Jkbn (Jurnal Konsep Bisnis Dan Manajemen)*, 7(2), 227–233. <https://doi.org/10.31289/jkbn.v7i2.5266>
- Frihatni, A. A., Sudirman, I., & Mandacan, F. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Perhotelan Akibat Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 7(3), 2019–2022. <https://doi.org/10.36312/jime.v7i3.2125>
- Hidayat, M. (2021). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Dan Nilai Perusahaan Sebelum Dan Disaat Pandemi Covid 19 Comparison. *Jurnal Akuntansi*, 15, 9–17.
- Onibala, A., Rotinsulu, T. O., Pingkan, I., & Rorong, F. (2021). DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA. In *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah* (Vol. 22, Issue 2).
- Onibala, A., Rotinsulu, T. O., & Rorong, I. P. F. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 22(2), 67–89.
- RAHMAWATI, F., & KISWARA, E. (2022). DAMPAK COVID-19 TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH (Studi Kasus Pada 34 Pemerintah Provinsi di Indonesia). 11, 1–8. <https://repofeb.undip.ac.id/10200/>

Saputri, O., & Hannase, M. (2021). Pengaruh Indikator Makroekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(1), 139–151. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6590](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6590)

Sidarta, A. L., Lating, A. I. S., & Syarifudin, S. (2021). PENGARUH KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN TERBUKA TERHADAP RETURN SAHAM PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Pada Perusahaan yang Tercatat di BEI Tahun 2020). *Media Mahardhika*, 20(1), 25–36. <https://doi.org/10.29062/mahardhika.v20i1.288>







PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

Idangin, nupah!

No.	Uraian	Reff	Anggaran Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	(%)	Realisasi Tahun 2018
1	2	3	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	7.5.1.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	7.5.1.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	7.5.1.1.1.1	1.315.000.000,00	1.067.325.935,83	81,17	947.531.861,90
4	Pendapatan Retribusi Daerah	7.5.1.1.1.2	132.348.700,00	103.997.461,44	78,65	57.277.225,40
5	Pendapatan Hasil Pengalihan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	7.5.1.1.1.3	17.809.700,00	18.233.587,00	102,39	10.493.129,25
6	Tam-ban-Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7.5.1.1.1.4	139.617.668,00	149.671.107,29	107,20	139.260.772,68
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		1.624.776.235,00	1.339.228.091,56	82,22	1.184.563.010,98
8	PENDAPATAN TRANSFER	7.5.1.1.2				
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	7.5.1.1.2.1				
10	Dana Bagi Hasil Pajak	7.5.1.1.2.1.1	104.257.475,00	104.700.000,00	100,00	92.911.904,75
11	Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam	7.5.1.1.2.1.2	7.338.801,00	7.338.801,00	100,00	4.596.794,85
12	Dana Alokasi Umum	7.5.1.1.2.1.3	809.925.000,00	1.179.245.000,00	145,60	1.294.534,25
13	Dana Alokasi Khusus	7.5.1.1.2.1.4	188.700.000,00	167.740.000,00	88,83	84.421.100,00
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		1.909.309.225,00	1.829.224.794,48	95,80	1.808.260.389,49
15	TRANSFER PEMERINTAH LAINNYA	7.5.1.1.2.2				
16	Dana Hibah Khusus	7.5.1.1.2.2.1	10.000,00	10.000,00	100,00	10,00
17	Dana Penyesuaian	7.5.1.1.2.2.2	31.415.999,00	31.415.999,00	100,00	17.875.000,00
18	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya		31.415.999,00	31.415.999,00	100,00	17.875.000,00
19	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	7.5.1.1.2.3				
20	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	7.5.1.1.2.3.1	337.584.703,66	356.994.230,00	105,75	272.493,00
21	Pendapatan Bagi Hasil Lain-lain	7.5.1.1.2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi		337.584.703,66	356.994.230,00	105,75	272.493,00
23	Total Pendapatan Transfer		2.274.310.628,10	2.212.979.024,48	97,30	2.098.135.622,53
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	7.5.1.1.3				
25	Pendapatan Hibah	7.5.1.1.3.1	138.825.600,00	132.401.628,12	95,37	121.588.241,97
26	Hutang Persepsi	7.5.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Pendapatan Dana Hibah	7.5.1.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Pendapatan Lainnya	7.5.1.1.3.4	17.664.400,00	17.664.400,00	100,00	17.664.400,00
29	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah		156.490.000,00	150.066.028,12	95,87	149.252.641,97
30	JUMLAH PENDAPATAN		4.093.376.463,10	3.666.359.090,04	90,04	3.428.479.709,16
31	BELANJA	7.5.1.2				
32	BELANJA OPERASI	7.5.1.2.1				
33	Belanja Pegawai	7.5.1.2.1.1	1.325.927.703,80	1.312.806.922,25	98,99	1.098.107.744,87
34	Belanja Barang	7.5.1.2.1.2	1.632.090.986,25	1.393.441.521,50	85,38	431.127.015,59
35	Belanja Biaya	7.5.1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Belanja Hibah	7.5.1.2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Belanja Honorarium	7.5.1.2.1.5	63.671.973,54	85.100.000,00	133,64	1.029.299,80
38	Belanja Bantuan Sosial	7.5.1.2.1.6	4.115.000,00	4.815.000,00	117,01	465.000,00
39	Jumlah Belanja Operasi		3.024.805.713,00	2.696.169.704,06	89,06	2.776.033.740,16
40	BELANJA MODAL	7.5.1.2.2				
41	Belanja Tanah	7.5.1.2.2.1	2.455.130,00	1.234.000,00	50,26	1.782.298,80
42	Belanja Peralatan dan Mesin	7.5.1.2.2.2	191.375.800,00	208.078.000,00	108,72	168.411.772,40
43	Belanja Gedung dan Bangunan	7.5.1.2.2.3	242.554.103,87	171.879.634,34	70,89	148.334.000,00
44	Belanja Jalan, jembatan, tanggul	7.5.1.2.2.4	813.344.790,37	410.000,00	50,41	412.524.700,00
45	Belanja Aset Tetap Lainnya	7.5.1.2.2.5	27.876.635,87	24.613.670,40	88,29	32.000.000,00
46	Belanja Aset Lainnya	7.5.1.2.2.6	1.505.500,00	984.000,00	65,36	420.275,50
47	Jumlah Belanja Modal		1.119.500.011,16	884.202.784,68	78,98	746.832.060,45
48	BELANJA TAK TERDUGA	7.5.1.2.3				
49	Belanja Tak Terduga	7.5.1.2.3.1	31.877.808,90	34.148.000,00	107,12	120.654.280,00
50	Jumlah Belanja Tak Terduga		31.877.808,90	34.148.000,00	107,12	120.654.280,00
51	JUMLAH BELANJA		4.176.183.531,40	3.548.066.636,74	84,96	3.522.966.464,89

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	(%)	Realisasi 2020
1	2	3	4	5	6	7
52	TRANSFER					
53	TRANSFER/BAGI HASIL KE KELURAHAN					
54	Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE KELURAHAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN					
59	Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169.896.000,00
61	JUMLAH TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169.896.000,00
62	TOTAL BELANJA DAN TRANSFER	4.165.165.032.351,61	3.150.496.728.994,07	1.014.668.303.357,54	75,64	2.969.786.003.772,68
63	SURPLUS/DEFISIT	(587.928.271.047,79)	135.551.768.309,86	(723.480.039.447,65)	(23,06)	353.876.282.829,60
64	PEMBIAYAAN					
65	PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
66	Penggunaan SILPA	592.928.271.047,79	592.714.926.737,79	213.344.310,00	99,96	239.051.988.218,19
67	Pencatatan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Penerimaan Kewajiban Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	592.928.271.047,79	592.714.926.737,79	213.344.310,00	99,96	239.051.988.218,19
81	PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
82	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	100,00	0,00
84	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Pembelian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Pembelian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Pembelian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Jumlah Pengeluaran	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	100,00	0,00
94	PEMBIAYAAN NETO	587.928.271.047,79	587.714.926.737,79	213.344.310,00	99,96	239.051.988.218,19
95	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	723.266.695.137,65	(723.266.695.137,65)	0,00	592.928.271.047,79
96	KOREKSI SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN		(501.872.494,00)	501.872.494,00	0,00	0,00
97	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN SETELAH KOREKSI		221.394.201,65	(221.394.201,65)	0,00	592.928.271.047,79



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Reff	Anggaran Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	(%)	Realisasi Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN	7.5.1.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	7.5.1.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	7.5.1.1.1.1	846.699.298.871,00	864.313.239.415,14	102,08	1.067.323.035.833,80
4	Pendapatan Retribusi Daerah	7.5.1.1.1.2	76.551.490.762,00	67.204.193.741,00	87,79	68.097.261.544,56
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	7.5.1.1.1.3	62.009.352.589,00	31.875.688.503,93	51,40	18.225.557.959,00
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7.5.1.1.1.4	158.906.038.659,00	114.938.439.209,88	72,33	149.670.382.216,38
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		1.144.166.180.881,00	1.078.328.561.269,15	94,25	1.303.316.337.553,94
8	PENDAPATAN TRANSFER	7.5.1.1.2				
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERMIBANGSAN	7.5.1.1.2.1				
10	Dana Bagi Hasil Pajak	7.5.1.1.2.1.a	103.114.705.000,00	113.949.131.588,00	110,50	73.049.789.865,00
11	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	7.5.1.1.2.1.b	4.395.504.000,00	4.842.507.754,00	110,17	4.623.235.530,00
12	Dana Alokasi Umum	7.5.1.1.2.1.c	1.286.419.315.000,00	1.249.647.311.469,00	97,14	1.379.148.200.000,00
13	Dana Alokasi Khusus	7.5.1.1.2.1.d	318.943.697.000,00	307.688.439.445,00	96,46	367.746.570.055,00
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		1.724.912.222.000,00	1.676.121.523.287,00	97,85	1.824.567.795.448,00
15	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	7.5.1.1.2.2				
16	Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dana Perovisian		74.623.320.000,00	74.623.320.000,00	100,00	31.415.999.000,00
18	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya		74.623.320.000,00	74.623.320.000,00	100,00	31.415.999.000,00
19	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	7.5.1.1.2.3				
20	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		324.386.692.000,00	307.750.607.332,13	94,33	346.994.230.000,97
21	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
22	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi		324.386.692.000,00	307.750.607.332,13	93,33	356.994.230.000,97
23	Total Pendapatan Transfer		2.111.923.144.000,00	2.053.495.450.619,13	97,23	2.213.978.024.448,97
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	7.5.1.1.3				
25	Pendapatan Hibah		185.288.057.199,00	168.818.274.714,00	90,99	132.401.628.152,00
26	Bantuan Keuangan		27.785.728.000,00	26.020.000.000,00	93,85	0,00
27	Pendapatan Dana Darurat		0,00	0,00	0,00	0,00
28	Pendapatan Lainnya		0,00	0,00	0,00	17.664.000.000,00
29	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah		213.073.815.199,00	194.838.274.714,00	90,93	150.065.628.152,00
30	JUMLAH PENDAPATAN		3.469.163.140.080,00	3.323.662.286.602,28	95,81	3.666.359.990.154,91
31	BELANJA	7.5.1.2				
32	BELANJA OPERASI	7.5.1.2.1				
33	Belanja Pegawai	7.5.1.2.1.1	1.293.975.502.732,00	1.218.380.549.202,00	94,16	1.212.306.922.225,00
34	Belanja Barang	7.5.1.2.1.2	1.440.723.717.301,00	1.189.897.135.242,81	82,53	1.393.040.321.041,50
35	Belanja Bunga	7.5.1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Belanja Subsidi	7.5.1.2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Belanja Hibah	7.5.1.2.1.5	224.244.500.199,00	185.766.766.000,00	82,84	55.552.460.000,00
38	Belanja Bantuan Sosial	7.5.1.2.1.6	1.495.000.000,00	1.260.050.000,00	84,28	2.870.000.000,00
39	Jumlah Belanja Operasi		2.969.436.720.232,00	2.594.304.738.544,81	87,37	2.663.769.704.066,50
40	BELANJA MODAL	7.5.1.2.2				
41	Belanja Tanah	7.5.1.2.2.1	39.649.800.000,00	0,00	0,00	1.234.902.430,00
42	Belanja Peralatan dan Mesin	7.5.1.2.2.2	91.410.005.510,00	59.823.460.691,87	65,44	268.978.239.337,00
43	Belanja Gedung dan Bangunan	7.5.1.2.2.3	182.707.238.481,00	65.693.438.029,00	35,93	171.879.674.000,00
44	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.5.1.2.2.4	28.179.800.488,00	11.433.264.836,00	40,58	416.511.780.032,00
45	Belanja Aset Tetap Lainnya	7.5.1.2.2.5	52.649.188.788,00	52.537.877.891,00	99,78	24.613.620.470,00
46	Belanja Aset Lainnya	7.5.1.2.2.6	788.000.000,00	314.649.366,00	40,19	954.608.000,00
47	Jumlah Belanja Modal		691.990.423.167,00	291.202.740.534,87	42,37	894.202.784.082,00
48	BELANJA TAK TERBUKA	7.5.1.2.3				
49	Belanja Tak Terduga		135.514.139.770,61	83.108.628.693,00	61,33	34.148.000,00
50	Jumlah Belanja Tak Terduga		135.514.139.770,61	83.108.628.693,00	61,33	34.148.000,00
51	JUMLAH BELANJA		3.706.941.283.170,62	2.968.616.107.772,68	80,08	3.548.006.636.749,30

No.	Uraian	Reff	Anggaran Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	(%)	Realisasi Tahun 2019
1	2	3	3	4	5	6
52	TRANSFER	7.5.1.3				
53	TRANSFER/BAGI HASIL KE KELURAHAN	7.5.1.3.1				
54	Bagi Hasil Pajak		0,00	0,00	0,00	0,00
55	Bagi Hasil Retribusi		0,00	0,00	0,00	0,00
56	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
57	JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE KELURAHAN		0,00	0,00	0,00	0,00
58	TRANSFER/ BANTUAN KEUANGAN	7.5.1.3.2				
59	Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
60	Bantuan Keuangan Lainnya		1.215.892.000,00	1.169.896.000,00	96,22	1.116.584.000,00
61	JUMLAH TRANSFER/ BANTUAN KEUANGAN		1.215.892.000,00	1.169.896.000,00	96,22	1.116.584.000,00
62	TOTAL BELANJA DAN TRANSFER		3.708.157.175.170,52	2.969.786.003.772,68	80,09	3.549.123.220.749,30
63	SURPLUS/DEFISIT		(238.994.035.090,52)	353.876.282.829,60	(148,07)	117.236.769.405,61
64	PEMBIAYAAN	7.5.1.3				
65	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	7.5.1.3.1				
66	Penggunaan S/DLPA		238.994.035.090,52	238.041.988.218,19	100,02	174.757.265.684,91
67	Pencarian Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
68	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00
69	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00	0,00	0,00
70	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
71	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00	0,00	0,00
72	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00	0,00	0,00
73	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00	0,00	0,00
74	Pinjaman Dalam Negeri - lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
75	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negeri		0,00	0,00	0,00	0,00
76	Penerimaan Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
77	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
78	Penerimaan Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
79	Penerimaan Pinjaman Kepada Perusahaan Negeri		0,00	0,00	0,00	0,00
80	Penerimaan Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
81	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		238.994.035.090,52	238.041.988.218,19	100,02	174.757.265.684,91
82	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.5.1.3.2				
83	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
84	Pembayaran Modal Pemerintah Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
85	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00	0,00	0,00
86	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
87	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00	0,00	0,00
88	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00	0,00	0,00
89	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00	0,00	0,00
90	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
91	Pembayaran Pinjaman kepada Perusahaan Negeri		0,00	0,00	0,00	0,00
92	Pembayaran Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
93	Pembayaran Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
94	Jumlah Pengeluaran		0,00	0,00	0,00	53.000.000.000,00
95	PEMBIAYAAN NETO		238.994.035.090,52	238.041.988.218,19	100,02	121.757.265.684,91
96	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	7.5.1.3.3	0,00	592.928.271.047,79	0,00	238.994.035.090,52

Makassar, 17 Mei 2021
WALIKOTA MAKASSAR

MOH. RAMDHAN POMANTO



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	(%)	Realisasi 2020
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
3	Pendapatan Pajak Daerah	1.000.025.000.000,00	924.347.962.910,12	75.677.037.089,88	92,43	864.313.230.515,14
4	Pendapatan Retribusi Daerah	91.794.490.000,00	54.184.449.344,56	37.610.040.655,44	59,03	67.204.193.741,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	82.746.654.000,00	22.251.084.159,45	60.495.569.840,55	26,89	31.875.688.803,93
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	151.808.867.303,82	139.544.987.283,80	12.263.880.020,02	91,92	114.935.439.209,08
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	1.326.375.011.303,82	1.140.328.483.697,93	186.046.527.605,89	85,97	1.078.328.561.269,15
8	PENDAPATAN TRANSFER					
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN					
10	Dana Bagi Hasil Pajak	95.293.092.000,00	148.225.851.881,00	53.032.759.881,00	155,67	113.943.184.588,00
11	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	5.016.966.000,00	7.438.257.946,00	2.421.291.946,00	148,26	4.842.507.754,00
12	Dana Alokasi Umum	1.257.670.897.000,00	1.233.440.789.380,00	24.230.107.620,00	98,07	1.249.647.391.000,00
13	Dana Alokasi Khusus	334.399.556.000,00	298.376.496.834,00	36.023.059.166,00	89,23	307.688.439.945,00
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	1.692.350.511.000,00	1.687.551.396.041,00	4.799.114.959,00	99,72	1.676.121.523.287,00
15	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA					
16	Dana Otomatis Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dana Penyesuaian	30.304.767.000,00	30.304.767.000,00	0,00	100,00	74.623.320.000,00
18	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	30.304.767.000,00	30.304.767.000,00	0,00	100,00	74.623.320.000,00
19	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI					
20	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	324.200.000.000,00	261.622.311.935,00	62.577.688.065,00	80,70	302.750.607.332,13
21	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	324.200.000.000,00	261.622.311.935,00	62.577.688.065,00	80,70	302.750.607.332,13
23	Total Pendapatan Transfer	2.046.855.278.000,00	1.979.478.474.976,00	67.376.803.024,00	96,71	2.053.495.450.619,13
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
25	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	165.818.274.714,00
26	Bantuan Keuangan	32.406.000.000,00	7.004.400.000,00	25.401.600.000,00	21,61	26.020.000.000,00
27	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Pendapatan Lainnya	171.600.472.000,00	159.237.138.720,00	12.363.333.280,00	92,80	0,00
29	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	204.006.472.000,00	166.241.538.720,00	37.764.933.280,00	81,49	191.838.274.714,00
30	JUMLAH PENDAPATAN	3.577.236.761.303,82	3.286.048.497.393,93	291.188.263.909,89	91,86	3.323.662.286.602,28
31	BELANJA					
32	BELANJA OPERASI					
33	Belanja Pegawai	1.331.940.717.356,83	1.208.914.475.888,00	123.026.241.468,83	90,56	1.218.380.837.302,00
34	Belanja Barang	1.761.124.783.971,66	1.352.754.719.951,50	408.370.064.020,16	76,81	1.188.897.135.242,81
35	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Belanja Hibah	152.524.325.077,00	103.207.048.632,00	49.317.276.445,00	67,67	185.766.766.000,00
38	Belanja Bantuan Sosial	770.000.000,00	396.990.000,00	373.010.000,00	51,56	1.260.000.000,00
39	Jumlah Belanja Operasi	3.246.359.826.405,49	2.665.273.234.471,50	581.086.591.933,99	82,10	2.594.304.738.544,81
40	BELANJA MODAL					
41	Belanja Tanah	21.307.760.000,00	6.598.922.100,00	14.708.837.900,00	30,97	0,00
42	Belanja Peralatan dan Mesin	161.885.417.290,00	110.252.404.448,00	51.633.012.851,00	68,11	59.823.460.691,87
43	Belanja Gedung dan Bangunan	123.778.197.818,00	34.540.693.805,57	89.237.504.012,43	27,86	65.093.458.020,00
44	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	329.697.044.926,00	149.470.608.679,00	180.226.436.247,00	45,34	113.433.294.536,00
45	Belanja Aset Tetap Lainnya	31.406.516.217,00	22.109.380.993,00	9.297.135.224,00	70,40	52.537.877.891,00
46	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	314.649.396,00
47	Jumlah Belanja Modal	668.274.936.260,00	322.972.030.025,57	345.302.906.234,43	48,33	291.202.740.534,87
48	BELANJA TAK TERDUGA					
49	Belanja Tak Terduga	250.530.269.686,12	162.251.464.497,00	88.278.805.189,12	64,76	83.108.628.693,00
50	Jumlah Belanja Tak Terduga	250.530.269.686,12	162.251.464.497,00	88.278.805.189,12	64,76	83.108.628.693,00
51	JUMLAH BELANJA	4.165.165.032.351,61	3.150.496.728.994,07	1.014.668.303.357,54	75,64	2.968.616.107.772,68

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	(%)	Realisasi 2020
1	2	3	4	5	6	7
52	TRANSFER					
53	TRANSFER/BAGI HASIL KE KELURAHAN					
54	Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE KELURAHAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	TRANSFER/ BANTUAN KEUANGAN					
59	Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169.896.000,00
61	JUMLAH TRANSFER/BANTUAN KEUANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169.896.000,00
62	TOTAL BELANJA DAN TRANSFER	4.165.165.032.351,61	3.150.496.728.994,07	1.014.668.303.357,54	75,64	2.969.786.003.772,68
63	SURPLUS/DEFISIT	(587.928.271.047,79)	135.551.768.399,86	(723.480.039.447,65)	(23,06)	353.876.282.829,60
64	PEMBIAYAAN					
65	PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
66	Penggunaan SiLPA	592.928.271.047,79	592.714.926.737,79	213.344.310,00	99,96	239.051.988.218,19
67	Pencanaan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Penerimaan Kewajiban Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	592.928.271.047,79	592.714.926.737,79	213.344.310,00	99,96	239.051.988.218,19
81	PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
82	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	100,00	0,00
84	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Jumlah Pengeluaran	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	100,00	0,00
94	PEMBIAYAAN NETO	587.928.271.047,79	587.714.926.737,79	213.344.310,00	99,96	239.051.988.218,19
95	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	723.266.695.137,65	(723.266.695.137,65)	0,00	592.928.271.047,79
96	KOREKSI SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN		(501.872.494,00)	501.872.494,00	0,00	0,00
97	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN SETELAH KOREKSI		722.764.822.643,65	(722.764.822.643,65)	0,00	592.928.271.047,79



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 2 Telp. (0411) 3633700-3615450, Fax. (0411) 3633700
 MAKASSAR 90111

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor 900.03/1247/BPKAD/VI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama HAMIM, SE, M.Ak
 Jabatan Kabid Akuntansi BPKAD

Menerangkan bahwa Mahasiswa/ Perguruan Tinggi yang bernama

Nama ARWINI MUSDALIFAH
 NIM 105731132918
 Jurusan Akuntansi (S1)
 Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar

Benar telah melakukan penelitian / pengumpulan data pada Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar, dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul: **"ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DI MASA PANDEMI COVID-19"**.

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Makassar, 30 Juni 2022
 Kabid Akuntansi
 BPKAD Kota Makassar.

HAMIM, SE, M.Ak
 NIP. 19830424 200909 1 001



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867

Email : Kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>

Makassar, 23 Mei 2022

K e p a d a

**Yth. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA MAKASSAR**

**Di -
MAKASSAR**

SURAT IZIN PENELITIAN
Nomor : 070/ 1068 -II/BKBPV/2022

- Dasar** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
 3. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan nomor **1360/S.01/PTSP/2022** Tanggal 20 Mei 2022 perihal Izin Penelitian.

Setelah membaca maksud dan tujuan penelitian yang tercantum dalam proposal penelitian, maka pada prinsipnya Kami menyetujui dan memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : **ARWINI MUSDALIFAH**
 NIM / Jurusan : 105731132918 / Akuntansi
 Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / UNISMUH
 Tanggal pelaksanaan: 23 Mei s/d 25 Juni 2022
 Jenis Penelitian : Skripsi
 Alamat : Jl. Siti Alauddin No. 259, Makassar
 Judul : **"ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DI MASA PANDEMI COVID-19"**

Demikian Surat Izin Penelitian ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Melalui Email Bidanghublabakesbangpolmks@gmail.com.

a.n. WALIKOTA MAKASSAR
 KEPALA BADAN KESBANGPOL
 u.b.
 SEKRETARIS,

DR. HARI, S.IP., S.H., M.H., M.Si

Pangkat : Pembina Tingkat I/IV.b
 NIP : 19730607 199311 1 001

Tembusan :

1. Walikota Makassar di Makassar (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul – Sel. di Makassar;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar (sebagai laporan);
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul Sel di Makassar;
5. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
6. Mahasiswa yang bersangkutan;
7. Arsip.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588



SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Arwini Musdalifah

NIM : 105731132918

Program Studi: Akuntansi

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	6 %	10 %
2	Bab 2	2 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 10 Agustus 2022

Mengetahui

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,



S.Hum.,M.I.P
NBM. 964 591

BAB I Arwini Musdalifah - 105731132918

ORIGINALITY REPORT



6% SIMILARITY INDEX

6% INTERNET SOURCES

3% PUBLICATIONS

3% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source 3%

2 scholar.unand.ac.id Internet Source 2%

3 www.slideshare.net Internet Source 2%

Exclude quotes

Exclude matches 2%

Exclude bibliography



BAB II Arwini Musdalifah - 105731132918

ORIGINALITY REPORT

22% SIMILARITY INDEX
24% INTERNET SOURCES
17% PUBLICATIONS
19% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	7%
2	repository.usd.ac.id Internet Source	4%
3	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	3%
4	123dok.com Internet Source	2%
5	www.researchgate.net Internet Source	2%
6	eprint.stieww.ac.id Internet Source	2%
7	Submitted to Universitas Muhammadiyah Makassar Student Paper	2%
8	www.studocu.com Internet Source	2%

BAB III Arwini Musdalifah - 105731132918

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.poltekkesjogja.ac.id Internet Source	2%
2	repository.stie-mce.ac.id Internet Source	2%
3	repository.usd.ac.id Internet Source	2%
4	repository2.unw.ac.id Internet Source	2%
5	id.scribd.com Internet Source	2%
6	www.coursehero.com Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

BAB IV ATWIFIH MUSDALIHAN - 105/31132918

ORIGINALITY REPORT



10%
SIMILARITY INDEX

1.1%
INTERNET SOURCES

3%
PUBLICATIONS

6%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	3%
2	www.ebbank.stiebbank.ac.id Internet Source	3%
3	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	2%
4	eprints.unm.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches On



ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.unhas.ac.id
Internet Source

4%

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

On



2
N
1
2
3

BIOGRAFI PENULIS



Arwini Musdalifah, panggilan Arwini. Lahir pada tanggal 16 Februari 2001 di Jeneponto, Sulawesi Selatan. Anak ketiga dari 4 bersaudara, anak dari pasangan Sainuddin dan Sitti Jumariah.

Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu Sekolah Dasar (SD) Inpres 227 Romanga lulus tahun 2012. Kemudian melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1

Jeneponto lulus tahun 2015, Serta melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 3 Jeneponto lulus pada taun 2018. Pada tahun 2018 penulis kemudian

melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi dan terdaftar sebagai mahasiswa Program Strata (S1) di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN